

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung: 2003
- Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Khairandy, Ridwan, Kepailitan dan Akibatnya, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2 No. 1, Feb. 2000
- Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta. 2011.
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mardiasmono, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2002
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Marzuki, PeterMahmud , *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Santoso Brotodihardjo, R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung: 2003, h.2.
- S. Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Suandy, Erly, *Perpajakan*, Salemba Empat, Yogyakarta: 2002
- Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, ANDI Offset, Yogyakarta, 2004,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Failissements-verordering Juncto UU No. 1 Tahun 1996)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Sukardji, Untung, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, RajaGrafindo Persada , Jakarta:, 2004

Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, ANDI Offset, Yogyakarta, 2004

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 1999

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafndo Persada, Jakarta, 1999.

Zandjani, Tubagus Chairul Amachi, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Surat Paksa

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-13/PPJ.75/1998

Internet :

<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19470-penagihan-seketika-dan-sekaligus> diakses pada tanggal 07 Mei 2019

<https://www.pajak.go.id/id/penagihan-pajak> diakses pada tanggal 07 Mei 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>

repository.maranatha.edu/22218/3/1251241_Chapter1.pdf diakses pada tanggal 2 Agustus 2019

